



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 31 Maret 2021

Halaman: 2

Yogya Segera Realisasikan Bank Tanah

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya berupaya untuk merealisasikan bank tanah guna mengamankan aset milik pemerintah. Keberadaannya juga mampu menunjang upaya investasi yang akan dilakukan di Kota Yogya.

Menurut Walikota Yogya Haryadi Suyuti, langkah awal untuk membentuk bank tanah ialah memperjelas aset yang dimiliki Pemkot. "Semua aset-aset tanah Pemkot harus disertifikasi. Kondisinya sekarang seperti apa, secara fisik bagaimana serta asal-usulnya dulu bagaimana. Semua itu harus tercatat dan terdapat secara jelas," terangnya di sela penandatanganan nota kesepakatan dengan Kantor

Pertanahan Kota Yogya di kompleks Balaikota, Selasa (30/3).

Nota kesepakatan yang di-jalin Pemkot Yogya dengan Kantor Pertanahan Kota Yogya berkaitan dengan sinergi perencanaan dan program pembangunan. Kesepakatan tersebut menjadi payung hukum bagi kedua belah pihak untuk saling bekerja sama demi percepatan pembangunan. Masa berlaku kesepakatan itu pun cukup lama yakni 60 bulan atau lima tahun.

Oleh karena itu, semua jengkal tanah milik Pemkot harus mampu tercatat dengan baik di Kantor Pertanahan Kota Yogya. Sehingga kelak tidak ada satu petak pun yang tidak bersertifikat. "Tertib aset ini harus kita jadikan keseriusan. Supaya misalnya, ke depan tidak ada persoalan seperti sertifikat ganda dan sebagainya. Apalagi kalau sudah masuk permasalahan jual beli. Makanya, aset tanah Pemkot harus tertib dan semua masuk bank tanah," imbuh Haryadi.

Dengan adanya bank tanah milik Pemkot, imbuh Haryadi, setiap investasi yang akan masuk pun bisa terpetakan dengan baik. Terutama investor yang hendak bekerja sama di atas lahan milik pemerintah. Begitu juga bagi pemerintah yang hendak menginvestasikan asetnya dengan pihak lain demi kepentingan publik.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya Wahyu Handoyo, menjelaskan tahun ini pihaknya sudah mengusulkan 25 bidang tanah untuk disertifikasi. Seluruhnya merupakan ruas jalan milik Pemkot Yogya yang selama ini digunakan untuk publik. Sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ruas jalan yang menjadi aset pemerintah harus memiliki bukti sertifikat. "Secara bertahap nanti semua ruas jalan yang totalnya mencapai sekitar 480an unit, akan kami usulkan," katanya.

Selain itu, dirinya pun akan segera merealisasikan bank tanah sesuai arahan walikota. Hal ini karena bank tanah selain strategis bagi kepentingan investasi, juga penting bagi pelayanan publik. Apalagi hampir setiap tahun Pemkot Yogya mengalokasikan pembelian tanah milik warga untuk kebutuhan ruang terbuka hijau. Meski statusnya milik Pemkot, namun lahan itu pun pemanfaatan dan pengelolannya dikembalikan lagi ke wilayah.

Sementara Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogya Rudi Prihantoro, mengaku siap untuk mensertifikatkan semua aset-aset milik Pemkot. Pihaknya bahkan sudah membentuk tim yang akan mempercepat penyelesaian jika dalam prosesnya ditemukan permasalahan.

"Harapannya semua aset-aset milik Pemkot Yogya bisa diamankan. Kami siap untuk itu, semua harus *clear and clean*," akunya. (Dh) f

Yogyakarta, 31 Maret 2021

KR Andri Wahdani

Walikota Yogya dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogya menjalin nota kesepakatan.



Nota kesepakatan yang ditandatangani Walikota Yogya Haryadi Suyuti dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogya Rudi Prihantoro.

Instansi	Nilai Berita	
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	☐ Negatif ☐ Positif ☐ Netral	☐ A ☐ B ☐ C
2.		
3.		
4.		
5.		

netral

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005